



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RENDY LESMANA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **622694**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.493.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2376 m²/210 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m²/126 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
3. Tanah Seluas 72800 m² di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 22500 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 32.500.000
5. Tanah Seluas 3000 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 585 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 2400 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, LAINNYA Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 465 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
10. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
11. Tanah Seluas 1200 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
12. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL



SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 192.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SUV FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI

Rp. 165.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

22.500.000

3. MOTOR, - - Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.748.500**D. SURAT BERHARGA** Rp. 47.543.620**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 160.251.227**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.981.543.347**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.981.543.347

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.